

**Analisis *Value for Money* Dalam Mengukur Kinerja Pajak Pada Badan
Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk,
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : MUHAMAD YOVI JOHAN
Npm : 1305170380
Program studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MUHAMAD YOVI JOHAN. NPM. 1305170380. Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Medan, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pajak pada BPPRD Kota Medan berdasarkan konsep *Value For Money* tahun 2012 sampai 2016 dan dampak pengukuran menggunakan konsep *Value For Money* terhadap pendapatan pajak pada BPPRD.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari BPPRD Kota Medan berupa data-data realisasi pendapatan pajak dan biaya operasi pada BPPRD Kota Medan yang cukup jelas untuk peneliti untuk menganalisis mulai pada Mei 2017 sampai Oktober 2017.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari pengukuran konsep *Value For Money* kinerja pada BPPRD Kota Medan tahun 2012-2016 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong kategori ekonomis rasionya berada diantara 70-80%, rasio efisiensi tergolong kategori sangat efisien rasionya berada dibawah 60%, dan rasio efektifitas tergolong kategori efektif, cukup efektif dan kurang efektif rasionya berada diantara 90-60%. Factor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya *Value For Money* adalah meningkatnya rasio ekonomis di sebabkan meningkatnya belanja operasi pada BPPRD Kota Medan dan menurunnya rasio efektifitas pada BPPRD Kota Medan disebabkan tidak tercapainya target pendapatan pajak. Dampak dari pengukuran dengan konsep *Value For Money* terhadap pendapatan pajak pada BPPRD Kota Medan adalah penyusunan target dan realisasi pendapatan pajak selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, pelayan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan agar keuangan ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah, dan menekan belanja operasi.

KATA KUNCI : Value For Money, Pengukuran Kinerja Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH yang memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Sekripsi ini.

Penulisan Sekripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul yang Penulis ajukan adalah **“Analisis Value for Money dalam mengukur kinerja Pajak Pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Dalam menyusun dan penulisan sekripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu pembuatan sekripsi ini, untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Johan Harun, Ibunda Nur Baeti yang tersayang yang tiada henti hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT dengan segala berkahnya.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE, M.Si, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tabjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Seprida Hanum HRP. SE, SS, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen dan Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
10. Bapak dan Ibu Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan.
11. Terima kasih Kepada Teman seperjuangan Dinda Aulia Rangkuti ,syahri Mahbengi, Rezki Aseng Pramukti, Eko Prasetio, Denny azahari, Juanda Louis , Arya Riski Hernandi, Ridho Bari dan Taufik Ramadhan Arifin yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kata sempurna , karena itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati pembaca.

Keritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan sekripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan dterimakasih dan semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Medan, September 2017
Penulis

Muhamad Yovi Johan
NPM: 1305170380

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak dan Tujuan Pajak	11
c. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Pajak Daerah.....	13
a. Pengertian Pajak Daerah.....	13
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah	14
3. Pengukuran Kinerja	15
a. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	15
b. Tujuan Pengukuran Kinerja	16
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	17
d. Indikator Pengukuran Kinerja	17
e. Kendala dan Tantangan Pengukuran Kinerja.....	19
f. Informasi Yang Digunakan Dalam Pengukuran Kinerja	19
4. <i>Value For Money</i>	20
a. Pengertian <i>Value for Money</i>	20
b. Indikator <i>Value For Money</i>	24
c. Karakteristik Indikator <i>Value For Money</i>	25
d. Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i>	26
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis Data	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.....	38
2. Daskripsi Data.....	40
3. Pengukuran Kinerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.....	44
4. Pengukuran <i>Value For Money</i>	44
4.1.Rasio Ekonomis	44
4.2.Rasio Efisiensi.....	47
4.3.Rasio Efektifitas	50
B. Pembahasan	56
1. Pengukuran Kinerja Pajak Pada Badan Pengelola Pajak &Retrebusi Daerah Kota Medan.....	56
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Terwujudnya Value For Money Dalam Pengelolaan Pajak Pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.....	58
3. Dampak Pengukuran Berdasarkan Konsep Value For Money Terhadap Pendapatan Pajak Pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	31
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 wajib pajak terdaftar	2
Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	4
Tabel I.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	4
Tabel I.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	5
Tabel I.5 anggaran dan realisasi biaya	5
Tabel II.1 Kriteria Ekonomis kinerja	22
Tabel II.2 Kriteria Efisiensi kinerja	23
Tabel II.3 Kriteria Efektivitas kinerja	24
Table II . 4 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 waktu penelitian	34
Tabel III.2 Kisi-kisi wawancara	36
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	40
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	41
Tabel IV.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	42
Tabel IV.4 Anggaran dan Realisasi Biaya	43
Tabel IV.5 Rasio Ekonomis	46
Tabel IV.6 Rasio Efisiensi	49
Tabel IV.7 Rasio Efektifitas	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus, yang selanjutnya disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reterbusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal.

Sumber pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pembayaran pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu

kebijakan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan yang telah di tentukan.

Berikut adalah data wajib pajak kota medan yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah di kota Medan:

Tabel I.1

Wajib Pajak Terdaftar di Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah

Tahun	WP Terdaftar (dalam ribuan)
2012	87
2013	92
2014	129
2015	135
2016	158

Kota Medan memiliki jumlah penduduk 2.210.624 jiwa, dengan pengelolaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia di kota medan maka potensi pajak kota medan akan terus meningkat, menjadikan pendapatan daerah akan terus meningkat, sehingga pembangunan daerah akan berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Dalam rangka mengukur tingkat kinerja dari Pendapatan daerah/Pajak dapat dilakukan berdasarkan *system value for money*, menurut mardiasmo (2011;131), ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* yaitu: ekonomis membandingkan realisasin biaya dengan target biaya, efisiensi membandingkan realisasi biaya dengan realisasi

pendapatan, dan efektifitas membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan. Dengan menggunakan system ini, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan pajak daerahnya.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari biaya yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya secara bersamaan. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah, (mardiasmo, 2009:7)

Pemerintah Daerah Kota Medan terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan Pemerintah Kota Medan maka diharapkan Pemerintah Kota Medan mampu untuk mengali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Badan Pengelola Pajak
&Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2012-2013

Uraian	2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Reaisasi
Pajak Hotel	80.000.000.000,00	64.574.093.185,09	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06
Pajak Restoran	113.209.144.000,00	83.182.567.950,56	113.209.114.000,00	91.590.223.058,75
Pajak Hiburan	32.308.417.000,00	21.262.060.747,81	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43
Pajak rekalame	56.161.250.000,00	25.954.919.442,70	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70
Pajak Penerangan Jalan	125.000.000.000,00	146.304.763.696,00	159.746.171.770,00	167.031.678.022,00
Pajak Parkir	15.000.000.000,00	6.838.441.855,34	10.000.000.000,00	7.340.782.715,07
B.P.H.T.B	220.000.000.000,00	259.114.429.583,50	330.974.000.000,00	243.748.816.689,00
P.B.B	300.000.000.000,00	274.853.657.632,00	383.000.000.000,00	234.352.129.214,00
Pajak Tanah dan Air	6.000.000.000,00	7.838.435.113,20	7.500.000.000,00	8.113.193.442,39
Total	942.287.811.000,00	889.923.369.206,20	1.189.898.952.770,00	877.982.814.346,71

Tabel I.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Badan Pengelola Pajak
&Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2014-2015

Uraian	2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Reaisasi
Pajak Hotel	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	87.980.801.593,00	81.701.267.881,61
Pajak Restoran	123.215.837.083,00	106.429.552.172,14	123.215.837.083,00	112.307.604.494,37
Pajak Hiburan	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	35.308.417.000,00	30.629.391.676,14
Pajak rekalame	35.308.417.000,00	10.709.910.917,00	49.095.950.000,00	3.551.947.419,00
Pajak Penerangan Jalan	164.746.171.770,00	190.552.925.861,00	209.771.148.770,00	222.310.180.341,00
Pajak Parkir	10.000.000.000,00	8.296.753.514,95	11.000.000.000,00	12.391.577.989,54
B.P.H.T.B	330.974.000.000,00	228.392.967.245,00	335.947.000.000,00	201.806.504.023,00
P.B.B	365.000.000.000,00	289.000.081.972,00	376.000.000.000,00	302.176.917.525,00
Pajak Tanah dan Air	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	9.500.000.000,00	10.670.666.180,81
Total	1.153.552.842.853,00	953.433.362.100,78	1.237.819.154.446,00	977.546.057.257,47

Tabel I.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Badan Pengelola Pajak
&Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2016

Uraian	2016	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	91.980.801.593,00	95.822.427.295,53
Pajak Restoran	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14
Pajak Hiburan	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25
Pajak rekalame	89.852.375.000,00	17.508.256.230,32
Pajak Penerangan Jalan	235.755.254.753,00	228.208.022.998,00
Pajak Parkir	14.000.000.000,00	16.866.401.417,00
B.P.H.T.B	336.974.000.000,00	264.722.907.298,00
P.B.B	386.540.861.523,00	334.513.267.325,00
Pajak Tanah dan Air	11.500.000.000,00	10.989.944.698,96
Total	1.335.127.546.952,00	1.132.652.367.794,20

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah kota medan, tentunya harus didukung oleh biaya yang cukup besar. Biaya pembangunan tersebut, didapat Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, berikut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel I.5
Anggaran dan Realisasi Biaya Badan Pengelola Pajak &
Retrebusi Daerah Kota Medan periode 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	98.394.176.072,00	68.462.839.762,00
2013	117.604.670.760,00	79.823.315.017,00
2014	123.603.452.829,00	94.198.829.396,00
2015	143.758.996.139,00	105.463.752.877,00
2016	145.365.868.159,00	115.394.557.585,00

Laporan belanja daerah pemerintah kota Medan

Pada table-tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai 2016 tidak sepenuhnya mencapai realisasi, tetapi target pendapatan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Medan kurang mampu mengelola pajak daerahnya. Pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan pajaknya masih kurang maksimal, karena perubahan peningkatan target pendapatan pajak setiap tahunnya masih belum signifikan, hal ini berdampak pada realisasi pendapatan pajak yang tidak terealisasi setiap tahunnya dari tahun-tahun sebelumnya, dan masalah-masalah dalam pemungutan pajak seperti, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, melaporkan pajak dan rendahnya regulasi yang ada dipemerintahan serta faktor-faktor lain dalam memungut pajak, hal ini berdampak terhadap pendapatan pajak yang seharusnya dapat dimaksimalkan, untuk dapat memaksimalkan otonomi daerah dan dapat memaksimalkan pembangunan, maka pemerintah Kota Medan Harus lebih meningkatkan pendapatan pajak daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2009:8) “adanya perlawanan-perlawanan dalam pembayaran pajak digolongkan menjadi dua perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif masyarakat enggan membayar pajak dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, system kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif meliputi usaha penghindaran pajak dengan perbuatan secara langsung ditujukan kepada

fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, *tax evasion* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang”.

Kemampuan pemerintah daerah kota Medan dalam mengelola pajak daerah dapat dilihat dari pendapatan dan penerimaan pajak daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak, baik dalam memungut pajak, melakukan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, pada sekripsi ini peneliti mencoba untuk menganalisis penerapan penerimaan pajak dari Kota Medan dalam lingkungan Kantor BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) kota medan. Dengan judul “**Analisis Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pajak Pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya Pendapatan pajak daerah yang tercermin dari tidak terealisasinya pendapatan pajak daerah Kota Medan tahun 2012-2016.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah terlihat dari masih rendahnya penerimaan realisasi pajak dari masing-masing pos pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Perpajakan Kota Medan, jika di ukur menggunakan *Value For Money*.?
2. Bagaimana dampak pengukuran berdasarkan konsep *Value for money* terhadap Anggaran Pendapatan Pajak Kota Medan.?

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat Kinerja Perpajakan pemerintah Kota Medan jika dilakukan dengan menggunakan pengukuran *Value For Money*.
2. Untuk mengetahui apa dampak pengukuran berdasarkan konsep *Value for money* terhadap pendapatan pajak Kota Medan.?

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *Value for money* dalam mengukur kinerja perpajakan Kota Medan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja perpajakan pemerintah daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi dan informasi yang dapat di gunakan untuk bahan penelitian dan perbandingan bagi peneliti yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2009 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (hal:1) pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip Erly Suandy (2005, hal.2) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘*surplus*’ nya merupakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investasi)

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai

keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak, iuran dari rakyat untuk negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Fungsi Pajak dan Tujuan Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih *alternative* pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Adam Smith Buku Zulia Hanum & Rukmini (2012, hal. 7) menjelaskan beberapa syarat yang penting dalam sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Equity, yaitu pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dalam keadaan yang sama.
- 2) Certainly, yaitu pajak yang dibayar harus terang dan tidak mengenal kompromi.
- 3) Convenient of Payment, yaitu pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat diterimanya penghasilan.
- 4) Efisiensi, yaitu pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

Terdapat 3 fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (regulated)
Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan. Contohnya: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian juga terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.
- 3) Fungsi Redistribusi / pemerataan / penyaluran kembali

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008, hal. 7) sistem sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas:

- 1) Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
- 2) Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

System, yaitu pihak ketiga diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut perda Kota Medan No. 7 Tahun 2011, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2003, hal. 7) yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak didalam Kabupaten/Kota adalah:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame

- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,dan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3. Pengukuran Kinerja

a. Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009,hal;121) Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui ala tukur financial dan non financial.

Sementara itu Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015,hal;271) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk, jasa maupun suatu proses.

Sedangkan menurut Nordiawan dan Hertianti (2010,hal;158) Pengukuran kinerja adalah instrumen yang di gunakan untuk menilai hasil ahir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang di tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses atau sistem yang mencatat dan

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2007;14) mengidentifikasi tujuan dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
- 5) Memotivikasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mardiasmo (2009;121) pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan pengukuran kinerja dapat disimpulkan yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian organisasi
- 2) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- 3) Memotivasi pegawai
- 4) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut mardiasmo (2009;122) manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki organisasi
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

d. Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan

organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012;196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infra struktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (Proses), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau atau menghasilkan jasa
- 3) Indikator Keluaran (Output), misalnya :
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator Impact, misalnya :
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

e. Kendala dan Tantangan Pengukuran Kinerja

Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;271) ada beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
- 2) Output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, *intangibile* dan *indirect* sehingga sulit di ukur.
- 3) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*disrectionary cost center*) karena sulitnya menetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas.
- 4) Tidak beroperasi berdasarkan *market forces* sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja.
- 5) Mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan.

f. Informasi Yang Digunakan Dalam Pengukuran Kinerja

Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;271) ada beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.

- 2) Output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, *intangible* dan *indirect* sehingga sulit di ukur.
- 3) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*disrectionary cost center*) karena sulitnya menetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas.
- 4) Tidak beroperasi berdasarkan *market forces* sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja.
- 5) Mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan.

4. Value For Money

a. Pengertian Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat di nilai dari dari output yang di hasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input,output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu di tambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*)

Menurut Mardiasmo (2009, hal;133) “*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya di minimalkan dan hasilnya di

maksimalkan, dan efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*”.

Value For Money merupakan konsep penting di dalam organisasi sektor publik di mana *value for money* memiliki pengertian terhadap nilai uang. *Value for money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik (Mahmudi,2011;89)

Menurut Indra Bastian (2006: 335) “*Value For Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pengukuran Kinerjanya . Tujuan *Value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah (Mardiasmo,2009:7).

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pengukuran *Value for money* adalah konsep pengukuran terhadap perusahaan sektor publik yang didalamnya meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

1) Rasio Ekonomis

Konsep Ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang di pergunakan, ekonomi merupakan ukuran relatif.

Suatu kegiatan operasional dapat di katakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015, hal 275). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis untuk mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik

Tabel II.1
Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100 %	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100 %	Tidak Ekonomis

Sumber : Mohammad Mahsun, 2006.

2) Rasio Efisiensi

Menurut Noerdiawan dan Hertianti (2010, hal 161) “Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dari sebuah aktivitas dengan sumber daya yang di gunakan”. Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money* , rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio Efisiensi di rumuskan dengan :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel II.2

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : keputusan Mendagri No.690.900-327 tahun 1996.

3) Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “ Rasio Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya Yang telah di

keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah yang anggaran, Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di di tetapkan.

Teknik analisis yang di gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio Efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Rasio Efektivitas di rumuskan dengan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel II.3

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

b. Indikator Value For Money

Indikator *Value for money* di bagi menjadi dua bagian yaitu (Mardiasmo,2009)

- 1) Indikaror alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu dan harga terbaik. Efisiensi artinya *output* tertentu dapat di capai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

2) Indikator kualitas pelayanan (Efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Dapat di simpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik adalah ekonomi mengenai input, efisiensi mengenai input dan output, dan efektivitas berhubungan dengan output dan outcome. Menurut Halim dan Kusufi (2013:136) konsep dasar indikator input adalah semua jenis sumber daya masukan yang di gunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output.

c. Karakteristik Indikator *Value For Money*

Menurut mahmud (2011;97) menyatakan bahwa indikator kinerja yang di kembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang di jelaskan antara lain :

- 1) Sederhana dan mudah dipahami.
- 2) Dapat diukur.
- 3) Dapat di kuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
- 4) Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
- 5) Berfokus kepada *customer service*, kualitas dan efisiensi
- 6) Dikaji secara teratur.

d. Manfaat Implementasi *Value For Money*

Penerapan konsep *Value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang di kehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi dalam sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009:103).

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi *value for money* adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang di berikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghambatan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai alat pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari berbagai manfaat yang di sebutkan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengukuran kinerja sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat dan sesuai

sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber dana yang ekonomis dan efisien.

Table II . 4
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ni Ketut Novi Trisna (2012)	Penilaian Kinerja Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karang Asem	Variabel: Kinerja Value For Money Pajak Hotel Restoran	Penilaian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berdasarkan Konsep Value For Money Ditinjau Dari Sudut Ekonomis Rata-Rata Menunjukkan Tingkat Ekonomis, Namun Kinerja Yang Ekonomis Perlu Ditinjau Lebih Lanjut Lagi. Mungkin Saja Ada Fenomena Faktual Di Pemerintahan Yang Membuat Anggaran Longgar Dan Terlihat Selalu Ekonomis.
Bahrn Assidiqi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”.	Variabel: Kinerja Keuangan, APBD	Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, Meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

Fitriyah Agustin (2007)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)	Variabel: Kinerja Keuangan Rasio pertumbuhan, rasio aktivitas, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio	berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.
Rodhian Wijaya (2007)	Analisis Perbandingan Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Modren pada Kantor Wilayah DJP Jakarta I	Variabel: Perbandingan Kinerja Sistem Administrasi Modren	Sistem administrasi modern di terapkan pada kantor wilayah DJP merupakan sebuah langkah besar dalam mereformasi instansi di Direktorat Jendral Pajak baik dari segi fungsi, struktur organisasi, maupun administrasi yang dilakukan.

Alayyal Khikmah (2014)	Pengukuran Kinerja Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Variabel: <i>Value for money</i> Ekonomis Efisien Efektif	Rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis hal ini karena rasio lebih dari 100%, hal ini berarti pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya- biaya yang dikeluarkan karena biaya-biaya yang di keluarkan lebih besar dari pada realisasinya yang telah dianggarkan
------------------------------	---	---	--

B. Kerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu, Data yang di gunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2016 yang bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Medan dan Peneliti melakukan penelitian dengan pengukuran *value for money*.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

Rasio Ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Rasio Efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio yang di capai melebihi seratus pesen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di

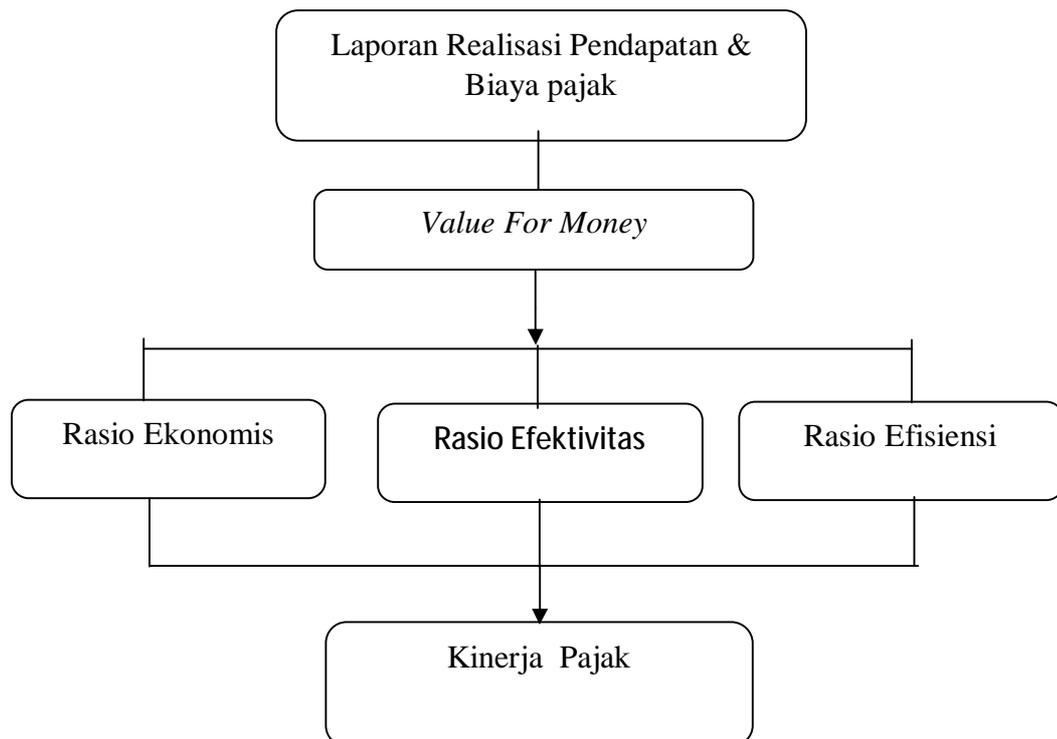
capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Perpajakan Kota Medan. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Perpajakan Kota Medan dapat dikatakan baik.

Berikut ini di tampilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar II.2

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang di terima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data laporan realisasi pendapatan pajak Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas kepada penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2012 hal 13) Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

1. *Value For Money*

Value for money merupakan pengukuran kinerja pemerintah yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang di belanjakan menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

a. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan pendapatan yang terealisasi.

c. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Keuangan merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk jasa maupun suatu proses.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang bertempat di Jalan. Jendral Abdul Haris Nasution no 32 Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 Telpon (061)785694, Email : koinfo@pemkomedan.go.id

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-1

Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	mei				juli				agustus				September				oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Riset					■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal															■					
5	Perbaikan Proposal															■	■				
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa Laporan Penerimaan Pajak Kota Medan periode 2012 sampai 2016.
- b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa wawancara langsung ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengenai laporan penerimaan Pajak Kota Medan yang diselenggarakan.

E. Sumber Data

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara terkait realisasi pendapatan Pajak dari target yang ditetapkan, dan data klasifikasi pendapatan pajak di kota Medan, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang Pendapatan Pajak Kota Medan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data Laporan Penerimaan Pajak Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Yaitu berupa Tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis .

Tabel III.2
Kisi-Kisi Wawancara

No	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Tentang Bagaimana Kinerja, dan siapa yang berwenang dalam dalam pengukuran kinerja.	1,2,3
2	Tentang tarif pajak dan kendala pemungutan pajak.	4,5,6
3	Tentang upaya yang dilakukan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan Pajak	7,8

b) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolah Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Medan berupa data Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Kota Medan periode 2012-2016.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif , yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang di teliti. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian.
2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian.
3. Menganalisis data yang ada dengan menggunakan pengukuran *Value For Money*.
4. Membahas tingkat Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisien.
5. mengukur kinerja perpajakan Kota Medan.
6. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan

pada mulanya Badan Pengelola Pajak & Retribusi Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak/wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak.

Dengan memperhitungkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.

Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan

Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan, yang mulai tahun 2017 berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Badan Pengelola Pajak & Retribusi daerah dipimpin oleh seorang pimpinan instansi yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten dan Kota.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang diteliti dari Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan dan belanja operasi Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah kota medan selama 5 tahun. Pendapatan pajak daerah kota medan berasal dari Sembilan sumber yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, B.P.H.T.B, P.B.B, dan Pajak Tanah dan Air. Berikut data-data pendapatan pajak dan belanja operasi di Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan di bawah ini :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada
Badan Pengelola Pajak &Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2012-2013

Uraian	2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Reaisasi
Pajak Hotel	80.000.000.000,00	64.574.093.185,09	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06
Pajak Restoran	113.209.144.000,00	83.182.567.950,56	113.209.114.000,00	91.590.223.058,75
Pajak Hiburan	32.308.417.000,00	21.262.060.747,81	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43
Pajak rekalame	56.161.250.000,00	25.954.919.442,70	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70
Pajak Penerangan Jalan	125.000.000.000,00	146.304.763.696,00	159.746.171.770,00	167.031.678.022,00
Pajak Parkir	15.000.000.000,00	6.838.441.855,34	10.000.000.000,00	7.340.782.715,07
B.P.H.T.B	220.000.000.000,00	259.114.429.583,50	330.974.000.000,00	243.748.816.689,00
P.B.B	300.000.000.000,00	274.853.657.632,00	383.000.000.000,00	234.352.129.214,00
Pajak Tanah dan Air	6.000.000.000,00	7.838.435.113,20	7.500.000.000,00	8.113.193.442,39
Total	942.287.811.000,00	889.923.369.206,20	1.189.898.952.770,00	877.982.814.346,71

Sumber: laporan realisasi pendapatan pajak kota medan

Pada tabel diatas dapat dilihat pendapatan pajak pada tahun 2012-2013 tidak sepenuhnya terrealisasi pada masing-masing pos pajaknya, dari tahun 2012-2013 pertumbuhan target penerimaan pajak juga tidak bertumbuh dengan signifikan, hal ini menunjukkan penerimaan pajak kota medan masih kurang maksimal.

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada
Badan Pengelola Pajak &Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2014-2015

Uraian	2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Reaisasi
Pajak Hotel	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	87.980.801.593,00	81.701.267.881,61
Pajak Restoran	123.215.837.083,00	106.429.552.172,14	123.215.837.083,00	112.307.604.494,37
Pajak Hiburan	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	35.308.417.000,00	30.629.391.676,14
Pajak rekalame	35.308.417.000,00	10.709.910.917,00	49.095.950.000,00	3.551.947.419,00
Pajak Penerangan Jalan	164.746.171.770,00	190.552.925.861,00	209.771.148.770,00	222.310.180.341,00
Pajak Parkir	10.000.000.000,00	8.296.753.514,95	11.000.000.000,00	12.391.577.989,54
B.P.H.T.B	330.974.000.000,00	228.392.967.245,00	335.947.000.000,00	201.806.504.023,00
P.B.B	365.000.000.000,00	289.000.081.972,00	376.000.000.000,00	302.176.917.525,00
Pajak Tanah dan Air	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	9.500.000.000,00	10.670.666.180,81
Total	1.153.552.842.853,00	953.433.362.100,78	1.237.819.154.446,00	977.546.057.257,47

Sumber: laporan realisasi pendapatan pajak kota medan

Begitu pula pada tahun 2014-2015 dapat dilihat dari tabel di atas total pendapatan pajak di tahun 2014-2015 mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan pendapatan pajak kota medan juga kurang maksimal. Kurang maksimal di karnakan perbandingan target dengan realisasi yang cukup besar.

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada
Badan Pengelola Pajak &Retribusi Daerah Kota Medan
Periode 2016

Uraian	2016	
	Target	Realisasi
Pajak Hotel	91.980.801.593,00	95.822.427.295,53
Pajak Restoran	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14
Pajak Hiburan	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25
Pajak reklame	89.852.375.000,00	17.508.256.230,32
Pajak Penerangan Jalan	235.755.254.753,00	228.208.022.998,00
Pajak Parkir	14.000.000.000,00	16.866.401.417,00
B.P.H.T.B	336.974.000.000,00	264.722.907.298,00
P.B.B	386.540.861.523,00	334.513.267.325,00
Pajak Tanah dan Air	11.500.000.000,00	10.989.944.698,96
Total	1.335.127.546.952,00	1.132.652.367.794,20

Sumber: laporan realisasi pendapatan pajak kota medan

Pada tahun 2016 pendapatan pajak kota medan meningkat, tetapi realisasi pendapatan pajak kota medan tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut menggambarkan upaya pemerintah kota medan dalam meningkatkan pendapatan pajak kota medan masih kurang maksimal.

Tabel IV.4
Anggaran dan Realisasi Biaya Badan Pengelola Pajak &
Retrebusi Daerah Kota Medan periode 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	98.394.176.072,00	68.462.839.762,00
2013	117.604.670.760,00	79.823.315.017,00
2014	123.603.452.829,00	94.198.829.396,00
2015	143.758.996.139,00	105.463.752.877,00
2016	145.365.868.159,00	115.394.557.585,00

Sumber: laporan belanja daerah pemerintah kota Medan

Pada tabel laporan realisasi pendapatan di atas menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Pajak Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan baik dari segi yang ditargetkan maupun yang terealisasi tetapi masih belum dapat mencapai target yang dianggarkan.

Sedangkan belanja operasi pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai 2016 juga mengalami peningkatan baik yang di anggarkan maupun yang terealisasi. Belanja operasi pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang di keluarkan pemerintah Kota Medan dalam melakukan pemungutan pajak.

3. Pengukuran Kinerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara pengukuran kinerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dilakukan oleh Badan Audit Pemerintah yang mana pengukurannya dilakukan dari segala aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan juga kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan. Pengukuran yang dilakukan menggunakan setandar pemeriksaan yang diatur di dalam UU No 15 Tahun 2004.

4. Pengukuran *Value For Money*

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan berdasarkan konsep *Value For Money* sebagai berikut:

4.1. Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang di gunakan untuk mendapatkan pendapatan daerah dengan anggaran biaya yang di gunakan untuk menghasilkan Pendapatan Daerah dapat di cari dengan rumus :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Ketentuan :

1) Jika $< 100\%$ maka Ekonomis

1) Jika $> 100\%$ maka tidak Ekonomis

2) Jika = 100% maka Ekonomis Berimbang

Perhitungan Rasio Ekonomis Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota

Medan tahun 2012 sampai 2016 sebagai Berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{68.462.839.762,00}{98.394.176.072,00} \times 100\% \\ &= 69,58\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{79.823.315.017,00}{117.604.670.760,00} \times 100\% \\ &= 67,87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{94.198.829.396,00}{123.603.452.829,00} \times 100\% \\ &= 76,21\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{105.463.752.877,00}{143.758.996.139,00} \times 100\% \\ &= 73,36\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{115.394.557.585,00}{145.365.868.159,00} \times 100\% \\ &= 79,38\%\end{aligned}$$

Pengukuran kinerja rasio ekonomis dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.5
Rasio Ekonomis
Kota Medan Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomis	Kriteria
2012	98.394.176.072,00	68.462.839.762,00	69,58%	Ekonomis
2013	117.604.670.760,00	79.823.315.017,00	67,87%	Ekonomis
2014	123.603.452.829,00	94.198.829.396,00	76,21%	Ekonomis
2015	143.758.996.139,00	105.463.752.877,00	73,36%	Ekonomis
2016	145.365.868.159,00	115.394.557.585,00	79,38%	Ekonomis

Sumber: Data di olah oleh Peneliti

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja pajak pemerintah kota medan tahun anggaran 2012 sampai 2016 tidak mengalami perubahan kriteria, setiap tahunnya tergolong kriteria Ekonomis. Pada tahun 2012 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan telah memenuhi kriteria Ekonomis hal ini ditunjukkan dengan data target anggaran biaya sebesar 98.394.176.072,00 dan realisasinya sebesar 68.462.839.762,00 dengan persentase 69,58% dan tergolong Ekonomis karena persentase dibawah 100%. Pada tahun 2013 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan menunjukkan target anggaran sebesar 117.604.670.760,00 dan Realisasinya 79.823.315.017,00 dengan persentase 67,87% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, tetapi walaupun menurun rasio ekonomis pada tahun 2013 masih tergolong ekonomis karena persentasenya berada dibawah 100%. Pada tahun 2014 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan kembali mengalami kenaikan dibandingkan dengan

tahun 2013, hal ini dilihat dari target anggaran sebesar 123.603.452.829,00 dan realisasinya 94.198.829.396,00 dengan persentase 76,21% dan masih tergolong ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%. Pada tahun 2015 target anggaran 143.758.996.139,00 dan realisasinya 105.463.752.877,00 dengan persentase 73,36% dan masih tergolong ekonomis karena persentasenya dibawah 100%. Pada tahun 2016 kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah pajak kota Medan kembali mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, hal ini dilihat dari target anggaran sebesar 145.365.868.159,00 dan realisasi 115.394.557.585,00 dengan persentase 79,38% dan masih tergolong dalam kriteria ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%.

4.2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi di lakukan untuk menggambarkan perbandingan antara Realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Rasio efisiensi di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Jika > 100% maka tidak Efisien
- 2) Jiak 90-100% maka Kurang Efisien

- 3) Jika 80-90% maka cukup Efisien
- 4) Jika 60-80% maka Efisien
- 5) Jika < 60% maka Sangat Efisien

Rasio efisiensi pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{68.462.839.762,00}{889.923.369.206,20} \times 100\% \\ &= 7,69 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{79.823.315.017,00}{877.982.814.346,71} \times 100\% \\ &= 9,09\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{94.198.829.396,00}{953.433.362.100,78} \times 100\% \\ &= 9,87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{105.463.752.877,00}{977.546.057.257,47} \times 100\% \\ &= 10,78\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{115.394.557.585,00}{1.132.652.367.794,20} \times 100\% \\ &= 10,18\%\end{aligned}$$

Pengukuran kinerja rasio efisiensi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.6
Rasio Efisiensi
Kota Medan 2012 sampai 2016

Tahun	Realisasi Biaya	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2012	68.462.839.762,00	889.923.369.206,20	7,69%	Sangat Efisien
2013	79.823.315.017,00	877.982.814.346,71	9,09%	Sangat Efisien
2014	94.198.829.396,00	953.433.362.100,78	9,87%	Sangat Efisien
2015	105.463.752.877,00	977.546.057.257,47	10,78%	Sangat Efisien
2016	115.394.557.585,00	1.132.652.367.794,20	10,18%	Sangat Efisien

Sumber: data diolah oleh peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pajak pemerintah daerah Kota Medan pada tahun 2012 sampai 2016 di lihat dari kriteria efisiensi adalah sangat efisien, pada tahun 2012 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan dilihat dari realisasi pendapatan pajak sebesar 889.923.369.206,20 dan realisasi biaya sebesar 68.462.839.762,00 dengan persentase 7,69%, hal ini tergolong sangat efisien karena persentasenya dibawah 60%. Pada tahun 2013 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan mengalami peningkatan dilihat dari pendapatan pajak sebesar 877.982.814.346,71 dan realisasi biayanya sebesar 79.823.315.017,00 dengan persentase 9,09%, hal ini tergolong sangat efisien karena dibawah 60%. Pada tahun 2014 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan kembali mengalami peningkatan dilihat dari data pendapatan pajak sebesar 953.433.362.100,78 dan realisasi biaya sebesar 94.198.829.396,00 dengan persentase

9,87%, hal ini tergolong sangat efisien karna persentaenya dibawah 60%. Pada tahun 2015 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan kembali mengalami peningkatan dilihat dari pendapatan pajaknya sebesar 977.546.057.257,47 dan realisasi biayanya sebesar 105.463.752.877,00 dengan persentase 10,78% hal ini tergolong sangat efisien karena persentasenya dibawah 60%. Pada tahun 2016 kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan kembali mengalami penurunan di lihat dari pendapatan pajak sebesar 1.132.652.367.794,20 dan realisasi biayanya sebesar 115.394.557.585,00 dengan persentase 10,18% hal ini tergolong sangat efisien karna persentasenya di bawah 60%.

4.3. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan Pendapatan Pajak yang di rencanakan di bandingkan dengan target yang telah di ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil daerah, rasio efektivitas di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan

- 1) Jika > 100% maka Sangat Efektif
- 2) Jika 90-100% maka Efekif
- 3) Jika 80-90% maka Cukup Efektif
- 4) Jika 60-80% maka Kurang Efektif

5) Jika < 60% maka Tidak Efektif

Rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{889.923.369.206,20}{942.287.811.000,00} \times 100\% \\ &= 94,44\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{877.982.814.346,71}{1.189.898.952.770,00} \times 100\% \\ &= 73,76\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{953.433.362.100,78}{1.153.552.842.853,00} \times 100\% \\ &= 82,65\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{977.546.057.257,47}{1.237.819.154.446,00} \times 100\% \\ &= 79,01\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{1.132.652.367.794,20}{1.335.127.546.952,00} \times 100\% \\ &= 84,83\%\end{aligned}$$

Pengukuran kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan dapat di lihat tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Rasio Efektifitas
Kota Medan 2012 sampai 2016

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektifitas	Kriteria
2012	942.287.811.000,00	889.923.369.206,20	94,44%	Efektif
2013	1.189.898.952.770,00	877.982.814.346,71	73,76%	Kurang Efektif
2014	1.153.552.842.853,00	953.433.362.100,78	82,65%	Cukup Efektif
2015	1.237.819.154.446,00	977.546.057.257,47	79,01%	Kurang Efektif
2016	1.335.127.546.952,00	1.132.652.367.794,20	84,83%	Cukup Efektif

Sumber : data diolah oleh peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di lihat dari kriteria efektifitasnya adalah efektif, kurang efektif dan cukup efektif. Pada tahun 2012 rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan dilihat dari target pendapatan pajak sebesar 942.287.811.000,00 dan realisasinya 889.923.369.206,20 dengan persentase efektifitasnya 94,44% hal ini tergolong efektif karena persentasenya di antara 90-100%. Pada tahun 2013 rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan mengalami penurunan kriteria dilihat dari target pendapatan pajak sebesar 1.189.898.952.770,00 dan realisasinya sebesar 877.982.814.346,71 dengan persentase efektifitasnya 73,76% hal ini tergolong kurang efektif karena persentasenya di antara 60-80%. Pada tahun 2014 rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan

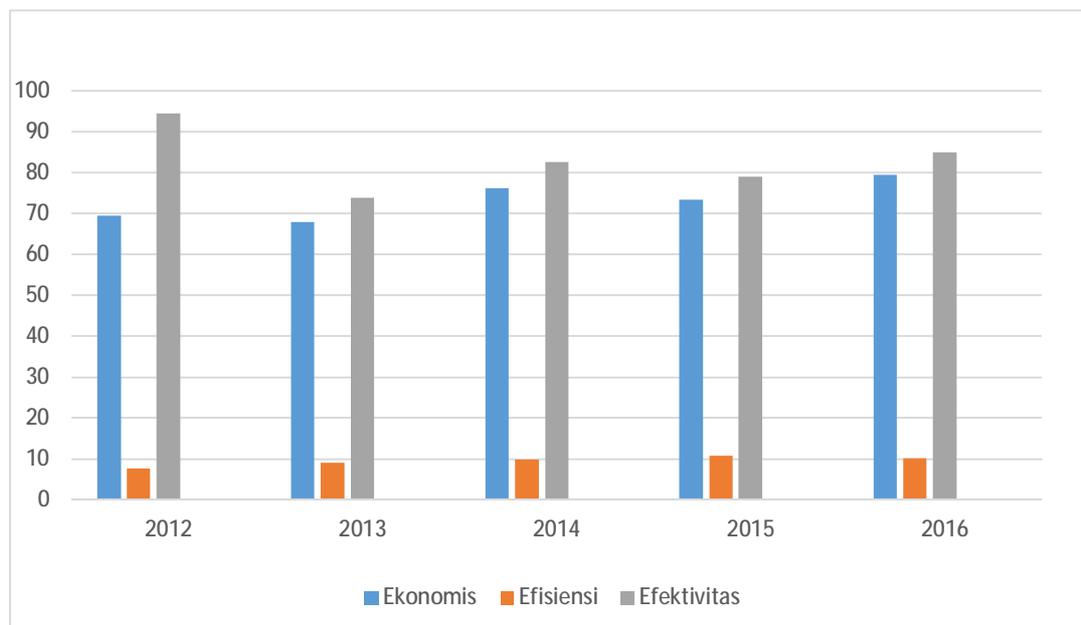
mengalami peningkatan kriteria dilihat dari target pendapatan pajak sebesar 1.153.552.842.853,00 dan realisasinya sebesar 953.433.362.100,78 dengan persentase efektifitasnya 82,65% hal ini tergolong cukup efektif karena persentasenya di antara 80-90%. Pada tahun 2015 rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan kembali mengalami penurunan kriteria dilihat dari target pendapatan pajak sebesar 1.237.819.154.446,00 dan realisasinya sebesar 977.546.057.257,47 dengan persentase efektifitasnya 79,01% hal ini tergolong kurang efektif karena persentasenya di antara 60-80%. Pada tahun 2016 rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan mengalami peningkatan kriteria dilihat dari target pendapatan pajak sebesar 1.335.127.546.952,00 dan realisasinya sebesar 1.132.652.367.794,20 dengan persentase efektifitasnya 84,83% hal ini tergolong cukup efektif karena persentasenya di antara 80-90%.

Target anggaran dan realisasi dari pendapatan pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan mengalami mengalami penurunan sedangkan anggaran biaya pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan Mengalami Peningkatan hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan berdasarkan pengukuran menggunakan konsep *Value For Money* belum sepenuhnya memenuhi unsur yang ada di dalam konsep *Value for Money* sehingga kurang terwujudnya ekonomis dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran.

5. Analisis kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota

Medan diukur dengan *Value For Money*.

Dari hasil pengukuran diatas mengenai konsep *Value For Money* pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :



Dapat dilihat dari grafik diatas rasio ekonomis mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori ekonomis pada tahun 2012 rasio ekonomis diantara 60-70%, pada tahun 2013 rasio ekonomis di antara 60-70%, pada tahun 2014 rasio ekonomis naik diantara 70-80%, pada tahun 2015 rasio ekonomis diantara 70-80%, dan pada tahun 2016 rasio ekonomis diantara 70-80%. Hal ini menunjukkan kenaikan rasio ekonomis disebabkan naiknya anggaran biaya pada Badan Pengelola Pajak &

Retrebusi Daerah Kota Medan tetapi biaya tersebut masih dikatakan ekonomis. Rasio efisiensi juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya tetapi masih dalam kategori sangat efisien dapat di lihat pada tahun 2012 rasio efisiensi berada dibawah 10%, pada tahun 2013 rasio efisiensi berada dibawah 10%, pada tahun 2014 rasio efisiensi berada dibawah 10%, pada tahun 2015 rasio efisiensi naik berada di antara 10-20%, tetapi pada tahun 2016 rasio efisiensi kembali berada di 10%. Hal ini menunjukkan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah dinilai sangat efisien. Sedangkan rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan mengalami penurunan hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 rasio efektifitas berada diantara 90-100% hal ini dikategorikan efektif, pada tahun 2013 rasio efektifitas mengalami penurunan berada diantara 70-80% hal ini dikategorikan kurang efisien, pada tahun 2014 rasio efektifitas naik berada di antara 80-90% hal ini dikategorikan cukup efisien, pada tahun 2015 rasio efektifitas kembali mengalami penurunan persentase berada diantara 70-80% hal ini dikategorikan kurang efektif, pada tahun 2016 rasio efektifitas naik berada diantara 80-90% hal ini dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan penurunan rasio efektifitas pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan disebabkan tidak terealisasinya target pendapatan pajak.

B. Pembahasan

1. Pengukuran Kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan Berdasarkan *value for money*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan periode tahun 2012 sampai tahun 2016 menggunakan metode *Value for money*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah daerah tidak bisa di nilai dari sisi biaya yang di hasilkan, tetapi secara integritas mempertimbangkan pendapatan, dan biaya secara bersama-sama. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah, (Mardiasmo,2009:7).

Peraturan pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang hendak di laksanakan atau yang telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kinerja pajak memenuhi kriteria Ekonomis, hal ini di karenakan realisasi biaya yang lebih rendah di dibandingkan dengan biaya yang di anggarkan sehingga rasio ekonomis dari tahun 2012 sampai 2016 berada di antara 70-100%. Walaupun rasionya setiap tahunnya mengalami fluktuasi tetapi tidak dengan anggaran biaya dan realisasi biayanya yang mana target biaya dan

realisasinya tahun 2012 sampai 2016 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa belanja yang di keluarkan pemerintah daerah setiap tahunnya semakin besar dan juga mengakibatkan rasio ekonomis juga mengalami peningkatan hal ini termasuk tidak baik. Dengan meningkatnya rasio ekonomis setiap tahunnya menunjukkan bahwa belanja yang di keluarkan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan semakin besar yang mana Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin kecil rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Dari tahun 2012 sampai 2016 kriteria efisiensi kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan berada pada kategori sangat efisien yang persentase rasionya berada di bawah 60% sedangkan tahun 2014 sampai 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan, tetapi walaupun mengalami peningkatan tahun 2013 sampai 2015 tetapi kriteria rasio masih dalam kriteria sangat ekonomis karna persentasenya di bawah 60%, hal tersebut menunjukkan belanja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan mengalami peningkatan tetapi masih dalam kriteria sangat ekonomis. Menurut Arfan Ikhsan, Muhammad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani menyatakan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Dengan efisiennya kinerja pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan maka perbandingan belanja oprasional dengan pendapatan besar menunjukkan bahwa belanja kecil dan pendapatan yang besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan

peneilitaian wulandari (2012) dan Ariasih (2009) dengan rasio efisiensinya tergolong efisien.

Untuk pengukuran dari efektivitas dari tahun 2012 sampai 2016 tergolong efektif, cukup efektif dan kurang efektif karena persentasenya berada di antara 90-100%, 80-90% dan 60-80%, yang mana realisasi pendapatan pajak tidak mencapai target yang telah di tentukan hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan di setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Badan Pengelolaan Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan 5 tahun terakhir kurang maksimal karena pendapatan setiap tahunnya mengalami penurunan berdasarkan rasio efektifitasnya, hal ini bertolak belakang dengan teori menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin besar rasio efektifitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) dan Ariasih (2009) yaitu rasio efektifitasnya tergolong kurang efektif karena rasionya berada diantara 60-80%.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Terwujudnya *Value For Money* Dalam Pengelolaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.

Dari penelitian yang telah dilakukan masing-masing rasio dalam kosep *value for money* tergolong baik, tetapi berdasarkan perhitungan yang dikaitkan dengan teori, kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan

berlawanan dengan teori, yang mana rasio ekonomis mengalami peningkatan, sedangkan berdasarkan teori Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin kecil rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, rasio efisiensi juga mengalami peningkatan tetapi masih dalam kriteria sangat efisien sesuai dengan teori Mardiasmo semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Akan tetapi rasio efektivitas mengalami penurunan berlawanan dengan teori Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin besar rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, dan Pendapatan pajak yang terealisasi tidak pernah mencapai target maupun melebihi target yang di anggarkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya pengukuran konsep *Value for money* dalam pengelolaan Pajak adalah :

- a) Dimana rasio ekonomis mengalami peningkatan karena di sebabkan oleh meningkatnya jumlah belanja operasi baik yang ditargetkan maupun yang terealisasi, yang di antaranya belanja pegawai, belanja barang belanja modal dan belanja tak terduga. Dengan meningkatnya rasio ekonomis menunjukkan Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan kurang mampu dalam penghematan belanja daerah khususnya untuk belanja operasi.
- b) Rasio efisiensi mengalami peningkatan karna realisasi pendapatan dan realisasi belanja meningkat setiap tahunnya, yang mana meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelola Pajak & Retribusi

Daerah Kota Medan mengalami penurunan karena belanja operasi yang di kelurkan masih banyak di gunakan sedangkan perbandingan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah tidak cukup signifikan.

- c) Rasio efektivitas mengalami penurunan hal ini menunjukkan efektivitas kinerja pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan mengalami penurunan hal ini di sebabkan karena besarnya target dan relisasi pendapatan mengalami penurunan setiap tahunnya yang mana pendapatan pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan besrsumber dari Pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, B.P.H.T.B, PBB dan Pajak Tanah dan Air, akan tetapi realisasi pendapatan pajak tidak pernah melebihi target hal ini disebabkan karena sumber pendapatan pajak tidak sepenuhnya terealisasi.

Penelitian ini pernah di lakukan oleh Peneliti sebelumnya, oleh Ni Ketut Novi Trisna Dewi (2012), yang mana hasil penelitiannya mengenai Kinerja pajak hotel dan restoran di pendapatan daerah Kabupaten Karang Asem menunjukkan bahwa Rasio Ekonomi dapat di ketahui priode tahun 2009 dan 2010 telah mampu melaksanakan seluruh program dengan ekonomis, Dari Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran di pendapatan daerah Kabupaten Karang Asem telah melaksanakan program dengan efisien, sementara Rasio Efektivitas pajak hotel dan restoran di pendapatan daerah Kabupaten Karang

Asem telah melaksanakan program dengan efektif dengan rasio efektivitas mencapai 90%.

3. Dampak Pengukuran Berdasarkan Konsep *Value For Money* terhadap pendapatan pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan.

Dari hasil penelitian pengukuran menggunakan konsep *Value for money* terhadap pendapatan pajak yang di rencanakan Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan periode tahun 2012-2016, maka dampak yang di timbulkan berdasarkan konsep *Value for money* adalah sebagai berikut :

- a) Akan berdampak terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Pajak di tahun selanjutnya yang mana berdasarkan data pertumbuhan Anggaran Pendapatan Pajak setiap tahunnya tidak signifikan.
- b) Berdampak terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Medan.

Yang mana pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak baik dari segi pendapatan yaitu masyarakat akan membayar pajak untuk menambah pendapatan daerah, dan dari segi belanja daerah berupa pelayanan yang di berikan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat.

- c) Akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa pelayanan Khususnya Pendidikan dan Kesehatan, keamanan, transportasi publik, infrastruktur seperti jalan yang bagus untuk mencapai daerah terpencil

dan Penyediaan barang kebutuhan publik seperti penyediaan bahan baku untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan dampak yang terjadi di atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan agar keuangan Ekonomis, Efisien, dan Efektivitas adalah :

- a) Meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya sumber Pendapatan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dengan cara mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan daerah.
- b) Menekan biaya untuk belanja operasi agar kualitas pelayanan yang di berikan seimbang dengan belanja yang di keluarkan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran berdasarkan *Value for money* terhadap pendapatan pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan masih termasuk belum sepenuhnya baik, karena salah satu indikator pengukurannya yaitu rasio efektifitas tergolong kurang efektif disebabkan karena perbandingan target pendapatan pajak dengan realisasi pendapatan pajak kurang signifikan yang menyebabkan rasio berada di kisaran 60-80% dan tergolong kurang efektif, sedangkan rasio ekonomis dan rasio efisiensi sangat baik karena masing-masing tergolong kategori ekonomis dan efisien.
2. Dampak dari pengukuran dengan konsep *value for money* terhadap pendapatan pajak pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan adalah terhadap penyusunan target dan realisasi pendapatan pajak tahun selanjutnya, pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Pajak & Retrebusi Daerah Kota Medan seharusnya menggunakan pengukuran konsep *Value for money* agar mengetahui kinerja keuangannya terhadap pendapatan pajak baik dari segi pendapatan daerah dan belanja daerah dan dapat di gunakan sebagai landasan untuk menyusun anggaran pajak tahun yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pada Badan Pengelola Pajak & Retrebusi daerah kota medan. Dengan menggunakan konsep *Value for money* dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 badan pengelola pendapatan daerah saja tetapi lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & syam Kusufi (2012) “Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik”. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Pramono Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015) “*Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*”. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN:2302-8556.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Deddi Nordiawan dan Hertianti (2010) “*Akuntansi Sektor Publik*”. Jakarta: Salemba Empat
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah Rahmawati. (2008) “*Akuntansi Pemerintahan*” Jakarta: Salemba Empat
- Demi Aulia Arfan (2014) “*Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*”. Skripsi UNY.
- Joko Pramono. (2014). “*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya*”. Skripsi STIE AMA Salatiga.
- Mardiasmo (2009) “perpajakan” Pt. Erlangga: Jakarta
- Mahmudi. (2011) “Manajemen Keuangan Daerah” PT. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik 2009*. Yogyakarta: CV ANDI Medan: Umsu Press.
- Muhammad Mahsun (2012) “*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*” Yogyakarta: BPFE
- Muhammad Mahsun (2012) “*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*” Yogyakarta: BPFE
- Rodiah Wijaya. (2014) “*Analisis Perbandingan Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money sebelum dan sesudah Penerapan Administrasi Modern Pada Kantor Wilayah DJP Jakarta I*” Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta 2014.
- Riki Hamdani. (2016) .“*Analisis Value For Money dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sugiyonos. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabet.